

**KEHIDUPAN MASYARAKAT KORBAN LUMPUR LAPINDO  
DI DESA KEDENSARI TANGGULANGIN SIDOARJO PASCA  
MENDAPAT DANA KOMPENSASI**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial  
(S. Sos) Dalam Bidang Sosiologi**



Oleh :

**FAIQOTUL HIMMAH**

**NIM. B05207019**

<b>PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA</b>	
No. KLAS K D.2012 006 543	No. REG : D.2012/sas/06
	ASAL BUKU :
	TANGGAL :

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**

**FAKULTAS DAKWAH  
PROGRAM STUDI SOSIOLOGI**

**FEBRUARI 2012**

**PERNYATAAN  
PERTANGGUNGJAWABAN SKRIPSI**

*Bismillahirrohmanirrohim*

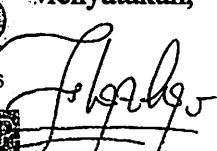

Yang bertana tangan di bawah ini, saya :

Nama : FAIQOTUL HIMMAH  
NIM : B05207019  
Program Studi : Desa Wates Kedensari Rt.07 Rw.02 Tanggulangin Sidoarjo  
Judul Skripsi : Kehidupan Masyarakat Korban Lumpur Lapindo di Desa Kedensari Tanggulangin Sidoarjo Pasca Mendapatkan Dana Kompensasi.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan kepada lembaga pendidikan manapun untuk mendapat gelar akademik apapun.
2. Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya secara mandiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain.
3. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini sebagai hasil plagiasi, saya bersedia menanggung segala konsekwensi hukum yang terjadi.

Surabaya, 30 Januari 2012

Menyatakan,  
  
  
**(FAIQOTUL HIMMAH)**  
B05207019



## PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi oleh Faiqotul Himmah ini telah dipertahankan di depan  
Tim Penguji Skripsi

Surabaya, 13 Februari 2012

Mengesahkan Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Fakultas Dakwah



Dekan,

**Dr. H. Aswadi, M. Ag**

NIP. 196004121994031001

Ketua,

**Dra. Suhartini M. Si**

NIP.195801131982032001

Penguji I,

**Dra. Hj. Nur Mazidah M. Si**

NIP. 195306131992032001

Penguji II,

**Amal Taufiq, S. Pd., M. Si**

NIP. 196901051993032001

## PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Nama : Faiqotul Himmah

NIM : B05207019

Prodi : Sosiologi

Judul : Kehidupan Masyarakat Korban Lumpur LAPINDO di Desa  
Kedensari Tanggulangin Sidoarjo Pasca Mendapatkan Dana  
Kompensasi

Surabaya, 30 Januari 2012

Telah Disetujui Oleh

Dosen Pembimbing



**Dra. Suhartini M. Si**

**NIP.195801131982032001**















dari Perpres 14/2007, Rp1,1 triliun untuk ganti rugi warga 9 RT, dan Rp2,9 triliun untuk ganti rugi warga yang tersisa dari Perpres 48/2008.

"Kenapa 45 RT tidak disebut? Warga kami resah karena takut tidak dapat ganti rugi," kata dia. Sementara itu Edi Purwinarto Asisten III Pemprop Jatim yang mewakili Gubernur menemui perwakilan warga mengatakan berdasarkan pertemuan di kantor Menseskab, hitungan Rp5,4 triliun itu memang untuk 54 RT, bukan untuk 9 RT yang merintis itu saja.

Lebih lanjut, Pemprop bahkan akan menindaklanjuti pertemuan di Jakarta itu dengan gelar pertemuan koordinasi melibatkan BPLS, BPN, BPKP, Bupati Sidoarjo, dan Dinas ESDM, Rabu (30/03). Pertemuan ini untuk mengkonkretkan hitungan anggaran untuk 54 RT tersebut.

"Target dari pemerintah sudah jelas. Tahun 2012 semua hal yang terkait dengan lumpur Lapindo, baik untuk ganti rugi warga dalam maupun di luar tanggungan Lapindo harus selesai," papar Edi.

Selanjutnya, Pemprop juga akan meminta Pemkab Sidoarjo lakukan pendataan ulang warga yang tinggal di 54 RT tersebut agar data tentang warga tidak lagi salah. Seperti diberitakan, 54 RT di kawasan luar peta terdampak versi Perpres 14/2007 dan 48/2008 sudah tidak lagi layak huni berdasarkan kajian ITS tahun lalu. Ancaman yang



Perjuangan yang sulit dan penderitaan yang sekian lama mereka rasakan mulai berakhir bagi sebagian korban lumpur Lapindo, karena dana kompensasi sebanyak 20% dari total kerugian materil yang mereka alami telah mereka dapatkan. Kini, banyak dari korban lumpur Lapindo yang tinggal dan menetap di desa-desa yang tersebar di sebagian wilayah Sidoarjo. Alasan mereka memilih lokasi yang tidak jauh dari bencana sangat sederhana agar tidak terlalu jauh dari sanak saudara mereka sehingga silaturahmi tetap terjaga dengan baik. Selain itu kapanpun mereka mau, mereka dapat dengan mudah mengunjungi lokasi rumah mereka yang telah tertutup semburan lumpur Lapindo dan mendoakan semoga semburan lumpur Lapindo segera berhenti agar tidak menyengsarakan masyarakat lainnya. Berpisah dengan sanak keluarga dan tetangga yang amat mereka cintai merupakan kerugian moril yang tidak dapat diganti atau dibayar dengan berapapun rupiah. Kehilangan tempat tinggal yang mereka tempati sejak lahir bahkan sejak nenek moyang mereka merupakan kerugian yang sangat menyakitkan. Makam-makam nenek moyang juga tidak terlihat lagi.

Dana kompensasi 20% dari total kerugian yang telah diberikan pemerintah terhadap korban lumpur Lapindo telah merubah kehidupan mereka. Mereka yang dulunya tinggal di tempat pengungsian atau bahkan ikut menginap di rumah sanak saudara kini mulai dapat membangun tempat tinggal yang layak huni.



Kebanyakan dari korban lumpur Lapindo menggunakan uangnya untuk membeli sepetak tanah di desa yang mereka pilih. Kemudian mereka membangun rumah megah yang terlihat sangat mencolok jika dibandingkan dengan rumah-rumah penduduk asli. Setelah itu, para korban lumpur Lapindo menempati rumah-rumah megah mereka. Tidak berhenti pada pembangunan rumah, beberapa korban Lapindo menggunakan uang kompensasi untuk membeli barang-barang mewah seperti mobil, sepeda motor baru dan ada juga yang menggunakan uang kompensasi untuk pergi haji dan umroh bersama sanak saudara mereka.

Dengan uang kompensasi 20% telah merubah kehidupan masyarakat korban lumpur Lapindo. Tidak berhenti sampai disitu tunjangan atau cicilan tiap bulan yang mencapai 15 juta per kepala keluarga juga semakin menunjang kehidupan ekonomi mereka. Beberapa dari mereka masih tetap bekerja seperti biasanya, beberapa juga bisa membangun bisnis baru dengan menggunakan dana tersebut. Akan tetapi sebagian dari mereka justru bermalas-malasan dirumah dan tidak bekerja. Uang 15 juta perbulan tersebut dirasa cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga mereka beberapa bulan kemudian.

Melihat fenomena sosial tersebut berbagai perbincangan masyarakat kian santer terdengar, mulai dari kecemburuan sosial hingga yang lainnya. Akan tetapi dibalik kehidupan ekonomi mereka yang kian



















































3. Rumah/tempat tinggal yang rusak sebanyak 1.683 unit
4. Areal pertanian dan perkebunan rusak hingga lebih dari 200 ha
5. Lebih dari 15 pabrik yang tergenang menghentikan aktivitas produksi dan merumahkan lebih dari 1.873 orang
6. Tidak berfungsinya sarana pendidikan
7. Kerusakan lingkungan wilayah yang tergenangi
8. Rusaknya sarana dan prasarana infrastruktur (jaringan listrik dan telepon)
9. Terhambatnya ruas jalan tol Malang-Surabaya yang berakibat pula terhadap aktivitas produksi di kawasan Ngoro (Mojokerto) dan Pasuruan yang selama ini merupakan salah satu kawasan industri utama di Jawa Timur.

Lumpur juga berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Kandungan logam berat (Hg), misalnya, mencapai 2,565 mg/liter Hg, padahal baku mutunya hanya 0,002 mg/liter Hg. Hal ini menyebabkan infeksi saluran pernapasan, iritasi kulit dan kanker.4 Kandungan fenol bisa menyebabkan sel darah merah pecah (hemolisis), jantung berdebar (*cardiac aritmia*), dan gangguan ginjal.

Selain perusakan lingkungan dan gangguan kesehatan, dampak sosial banjir lumpur tidak bisa dipandang remeh. Setelah

lebih dari 100 hari tidak menunjukkan perbaikan kondisi, baik menyangkut kepedulian pemerintah, terganggunya pendidikan dan sumber penghasilan, ketidakpastian penyelesaian, dan tekanan psikis yang bertubi-tubi, krisis sosial mulai mengemuka. Perpecahan warga mulai muncul menyangkut biaya ganti rugi, teori konspirasi penyuapan oleh Lapindo,6 rebutan truk pembawa tanah urugan hingga penolakan menyangkut lokasi pembuangan lumpur setelah skenario penanganan teknis kebocoran 1 (menggunakan *snooping unit*) dan 2 (pembuatan *relief well*) mengalami kegagalan. Akhirnya, yang muncul adalah konflik horisontal.

Berbagai bantuan telah diberikan oleh pihak Lapindo untuk mengurangi dampak sosial pada kondisi darurat, baik yang terjadi karena dampak semburan maupun penurunan tanah, serta melaksanakan tindakan berjaga-jaga sebagai bentuk kesiapsiagaan apabila terjadi bencana

#### **A. Bantuan Sosial**

Bantuan sosial ditujukan untuk mengurangi dampak sosial pada kondisi darurat, baik yang terjadi karena dampak semburan maupun penurunan tanah, serta melaksanakan tindakan berjaga-jaga sebagai bentuk kesiapsiagaan apabila terjadi bencana.



Kedungbendo (Perumtas I, Perum Citra Pesona), Ketapangkeres, Kalitengah, dan Glagaharum, berjumlah 4.350 KK/16.525. Dari jumlah ini sebanyak 210 KK/1758 jiwa merupakan penduduk musiman. Setelah mendapatkan bantuan sosial yang berupa uang kontrak rumah, jaminan hidup dan biaya pindah, kecuali penduduk musiman tidak diberikan jaminan hidup, mereka bersedia meninggalkan Pasar Porong Baru. Namun pengungsi tahap ketiga, periode April s/d 8 Juni 2008 yang berasal dari Desa Renokenongo, berjumlah 867 KK/2924 Jiwa tidak bersedia menerima bantuan sosial, mereka memilih untuk tetap tinggal di Pasar Porong Baru, serta menolak skema penanganan masalah sosial kemasyarakatan yang dituangkan dalam Perpres No. 14 tahun 2007.

Kewajiban untuk memberikan bantuan sosial sebenarnya tidak tercantum dalam Perpres No. 14 Tahun 2007. Bantuan sosial yang diberikan kepada warga di dalam peta area terdampak oleh PT. Lapindo Brantas/ PT Minarak Lapindo Jaya merupakan bentuk dari Corporate Social Responsibility (CSR) dari badan usaha tersebut.

### **3. Bantuan Sosial Berdasarkan Perpres 48 / 2008**

Bantuan sosial yang diamanahkan oleh Perpres 48 / 2008 adalah bantuan sosial untuk warga di 3 Desa yaitu Desa Besuki, Desa Kedungcangkring, dan Desa Pejarakan. Bantuan sosial untuk

warga di tiga desa di atas diberikan karena adanya rencana pemerintah untuk memanfaatkan desa tersebut sebagai kolam penampung lumpur sebelum dialirkan ke sungai Kali Porong. Sesuai dengan jadwal waktu yang ditetapkan, proses pencairan dana bantuan sosial telah dapat diselesaikan pada tanggal 28 September 2007 sehingga bantuan sosial yang berupa bantuan kontrak rumah dan biaya pindah telah diberikan kepada 1.666 Kepala Keluarga di tiga desa yaitu Kedungcangkring 151 KK, Besuki 1.066 KK dan Pejarakan 449 KK dengan dana bantuan yang berjumlah Rp. 4.998.000.000,-. Sedangkan bantuan sosial yang berupa jaminan hidup diberikan kepada semua warga desa yang namanya tercantum dalam Kartu Keluarga sebanyak 6.094 Jiwa, dengan nilai uang sebesar Rp. 1.828.200.000.

#### **4. Bantuan Air Bersih**

Bantuan air bersih diberikan kepada warga di 12 desa/kelurahan yang sumber airnya tercemar, yaitu Siring, Jatirejo, Renokenongo, Kedungbendo, Ketapang, Kalitengah, Gempolsari, Glagaharum, Besuki, Kedungcangkring, Pejarakan dan Mindi. Pelaksanaan pekerjaan dimulai tanggal 14 April 2008. Bantuan air



pihak penjual dan PT. Lapindo Brantas/PT. Minarak Lapindo Jaya sebagai pembeli.

Dalam rangka memfasilitasikan penyelesaian ganti rugi/jual beli tanah dan bangunan Deputi bidang Sosial menyiapkan sarana/prasarana perkantoran, membentuk Tim Verifikasi Tanah dan Bangunan milik warga dalam wilayah peta area terdampak, serta tenaga pendukung administrasi. Tim verifikasi ini merupakan sebuah tim yang dibentuk berdasar hasil konsultasi dan koordinasi dari berbagai pihak/instansi yang terkait dengan penyelesaian masalah-masalah verifikasi yang sangat kompleks.

Sesuai dengan arahan Presiden, target yang harus dicapai dalam penanganan masalah sosial kemasyarakatan yang terkait dengan ganti rugi adalah terselesaikannya pemberian ganti rugi/pembayaran uang muka sebesar 20% terhadap 10.000 KK terdampak pemilik tanah dan bangunan dalam waktu 10 minggu, terhitung mulai Bulan Juni 2007.

Proses jual beli tanah dan bangunan yang diperkirakan sebanyak 14.000 bidang, pemberian kompensasi gagal panen, pabrik dan buruh, serta pemberian bantuan sosial kepada 34.000 jiwa di 12 desa di dalam peta area terdampak tanggal 22 Maret 2007 dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab PT. Lapindo Brantas/





unit. Dari 25 ini 14 diantaranya sudah menerima ganti rugi, sisanya 11 unit masih dilakukan negoisasi antara PT.MLJ dengan pihak pengusaha. Hingga kini belum terdapat perkembangan dalam penyelesaiannya.

#### **4. Kompensasi Usaha Kecil dan Menengah (UKM)**

Kelompok ini terdiri atas pemilik stan, pedagang-pedagang mikro yang menggelar dagangannya di depan rumah masing. Pemilik stan berjumlah 393 orang dan pedagang mikro sebesar 347 orang. Para Pemilik stan menuntut kompensasi sesuai dengan harga beli stan yang menurut keterangan dari wakil mereka rata-rata sudah di atas Rp. 4.500.000,-/m<sup>2</sup>. Jadi jauh di atas harga ganti rugi yang ditetapkan PT. Lapindo Brantas/PT Minarak Lapindo Jaya. Pedagang-pedagang mikro hanya menuntut penggantian modalnya yang telah habis. Pedagang buah di Pasar Buah Jatirejo menuntut ganti rugi atas tanah dan bangunannya.

Bapel BPLS mengadakan sarasehan, sosialisasi dan penyebaran informasi tentang BPLS dan Perpres 14 tahun 2007 sebagai dasar pemecahan masalah. Pendekatan individual kepada tokoh atau perwakilan mereka, serta mempertemukan kepada pejabat PT. Lapindo Brantas/PT. Minarak Lapindo Jaya yang



























































































































keluarga. Sedangkan menurut masyarakat desa Kedensari hasil pekerjaan sebagai seorang petani dirasa tidak cukup bahkan kurang untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dari keempat informan yaitu Bapak H. Tupan, Bapak H. Denin, Ibu Nur Azizah dan Bapak Solikin, seluruhnya bekerja sebagai petani. Akan tetapi seperti yang telah dijelaskan di atas kondisi ekonomi mereka sangat baik. Bisa dilihat dari keempat informan tersebut, tiga diantaranya sudah merencanakan untuk pergi haji. Sedangkan Ibu Nur Azizah sendiri bisa menguliahkan kedua anaknya, dimana kita ketahui bersama biaya kuliah saat ini tidaklah murah.

Selain itu pola kehidupan ekonomi masyarakat korban lumpur Lapindo di desa ini memang lebih tinggi dari pada masyarakat sekitar. Hal tersebut dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari tentang kesenjangan sosial masyarakat asli desa Kedensari dengan masyarakat korban lumpur Lapindo.

Dalam bentuk bangunan fisik bisa terlihat secara kasat mata dimana rumah korban lumpur Lapindo yang ada di desa Kedensari kebanyakan lebih bagus daripada masyarakat sekitar. Pandangan ini dilihat dari sudut mata pencaharian, dimana masyarakat yang bekerja sebagai petani memiliki rumah yang biasa saja. Berbeda dengan para pengrajin atau pengusaha yang



mereka untuk hal-hal yang bersifat keagamaan. Seperti berkorban di saat hari raya Idul Qurban, bersodaqoh di masjid dan anak yatim, pergi umroh dan banyak juga yang memakai uang kompensasi yang mereka dapatkan untuk pergi haji. Seperti yang dikemukakan oleh Ustadz Saiful Bahri bahwasanya korban lumpur Lapindo yang menetap di desa Kedensari ikut memberikan sumbangan kepada ta'mir masjid dan memberikan hewan kurban mereka pada saat hari raya Idul Qurban kemarin. Selain itu juga pendapat masyarakat tentang keluarga Ibu Nur Azizah yang membagikan makanan dan sodaqoh pada anak yatim setiap bulan pada hari Kamis Legi.

### **c. Pandangan Masyarakat Tentang Korban Lumpur Lapindo di Desa Kedensari**

Fenomena lumpur panas Lapindo yang telah berlangsung selama hampir 7 (tujuh) tahun bukan hal yang luar biasa lagi bagi masyarakat. Menerima sebagian korban tersebut untuk menjadi bagian dari kehidupan sosial mereka adalah bentuk rasa toleransi terhadap sesama. Seperti yang diungkapkan Ir. Sujamto dalam bukunya bahwa *“Satu aspek budaya jawa yang potensial adalah toleransinya yang amat*







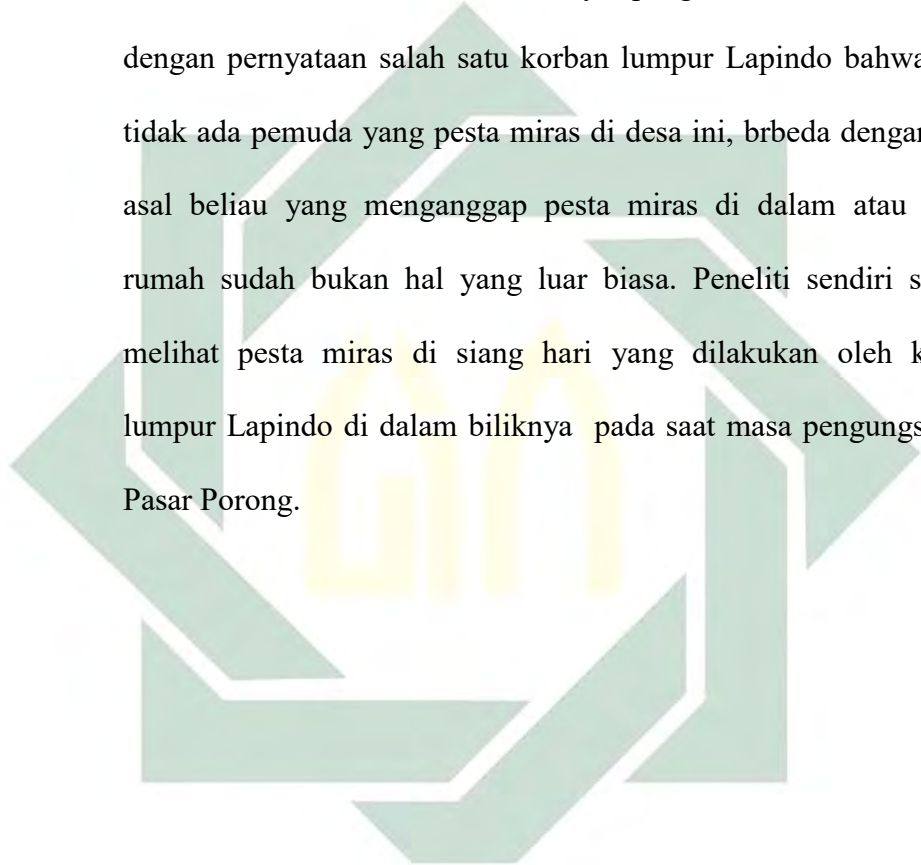


tanah nenek moyang yang telah mereka pahami bagaimana tata sosial, nilai dan norma serta berbagai kebudayaan yang telah melekat di hati dan pikiran mereka, saat ini mereka dihadapkan pada lingkungan tempat tinggal baru. Dimana desa yang mereka tempati ini merupakan sebuah lingkungan hidup baru, budaya baru, nilai dan norma baru yang masih belum mereka pahami secara baik. Sementara itu bagi warga asli desa kedatangan korban lumpur Lapindo di desa mereka juga membawa beberapa perubahan dimana sebelumnya masih banyak tanah kosong yang ada di sekitar rumah mereka kini berubah menjadi bangunan rumah-rumah megah milik korban lumpur Lapindo. Demikian halnya dengan kegiatan jam'iyah Islamiyah di desa ini juga berubah dengan keikutsertaan korban lumpur Lapindo dalam berbagai kegiatan keagamaan di desa ini.

Teori fungsionalisme struktural menekankan kepada keteraturan dan mengabaikan konflik dan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Menurut teori ini masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian atau elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan. Dengan asumsi dasarnya adalah bahwa setiap struktur dalam sistem sosial memiliki fungsi terhadap yang lain. Sementara struktur yang tidak berfungsi akan hilang dengan sendirinya. Fenomena masyarakat korban lumpur Lapindo yang hidup dan menetap di desa Kedensari



kegiatan keagamaan masyarakat tersebut. Karena mereka tidak mempunyai pilihan lain. Nilai dan norma yang berlaku di desa ini bahwasanya seluruh masyarakat desa adalah orang-orang agamis yang selalu aktif mengikuti kegiatan keagamaan dan tidak melakukan tindakan-tindakan menyimpang. Hal tersebut terbukti dengan pernyataan salah satu korban lumpur Lapindo bahwasanya tidak ada pemuda yang pesta miras di desa ini, berbeda dengan desa asal beliau yang menganggap pesta miras di dalam atau depan rumah sudah bukan hal yang luar biasa. Peneliti sendiri sempat melihat pesta miras di siang hari yang dilakukan oleh korban lumpur Lapindo di dalam biliknya pada saat masa pengungsian di Pasar Porong.







keluarga. Sedangkan menurut masyarakat desa Kedensari hasil pekerjaan sebagai seorang petani dirasa tidak cukup bahkan kurang untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dari keempat informan yaitu Bapak H. Tupan, Bapak H. Denin, Ibu Nur Azizah dan Bapak Solikin, seluruhnya bekerja sebagai petani. Akan tetapi seperti yang telah dijelaskan di atas kondisi ekonomi mereka sangat baik. Bisa dilihat dari keempat informan tersebut, tiga diantaranya sudah merencanakan untuk pergi haji. Sedangkan Ibu Nur Azizah sendiri bisa menguliahkan kedua anaknya, dimana kita ketahui bersama biaya kuliah saat ini tidaklah murah.

Selain itu pola kehidupan ekonomi masyarakat korban lumpur Lapindo di desa ini memang lebih tinggi dari pada masyarakat sekitar. Hal tersebut dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari tentang kesenjangan sosial masyarakat asli desa Kedensari dengan masyarakat korban lumpur Lapindo.

Dalam bentuk bangunan fisik bisa terlihat secara kasat mata dimana rumah korban lumpur Lapindo yang ada di desa Kedensari kebanyakan lebih bagus daripada masyarakat sekitar. Pandangan ini dilihat dari sudut mata pencaharian, dimana masyarakat yang bekerja sebagai petani memiliki rumah yang biasa saja. Berbeda dengan para pengrajin atau pengusaha yang







Seperti yang dinyatakan oleh Ustadz Saiful Bahri bahwasanya sebagai sesama umat muslim harus membuka pikiran lebar-lebar agar tidak hanya beranggapan korban lumpur Lapindo adalah orang kaya baru dan beruntung. Akan tetapi seharusnya kita memiliki rasa simpati atas penderitaan mereka yang telah terusir dari tempat tinggal secara paksa, kehilangan harta benda, kehilangan sistem kekerabatan, dan kehilangan lingkungan hidup mereka. Dimana suatu lingkungan hidup sebenarnya merupakan suatu ruang yang merupakan wadah dimana terjadi proses yang saling mengkait antara unsur-unsur kebendaan dan spiritual. Dana kompensasi hanya bisa menggantikan kerugian materil saja.

Demikian halnya dengan pernyataan Bapak Zakariyah bahwa dalam kehidupan sehari-hari korban lumpur Lapindo bisa diterima oleh masyarakat. Karena dalam bersosialisasi dan berinteraksi korban lumpur Lapindo melakukan dengan cara yang sangat baik. Salah satunya dalam kegiatan kerja bakti, warga masyarakat saling bekerjasama, dimana kerjasama merupakan aktifitas yang mewujudkan sifat tolong menolong.

Selain dua pernyataan di atas, pernyataan lain juga muncul dari warga asli desa Kedensari yang menyatakan bahwasanya korban lumpur Lapindo cenderung bersifat







